

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN AK/I – AK/V
DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN JOMBANG**



OLEH :

SITI MARDIANI

NIM : 071143021

**PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2015**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN AK/I – AK/V
DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN JOMBANG**



TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister dalam program Studi Magister
Kebijakan Publik pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Airlangga**

Oleh :

**SITI MARDIANI
NIM : 071143021**

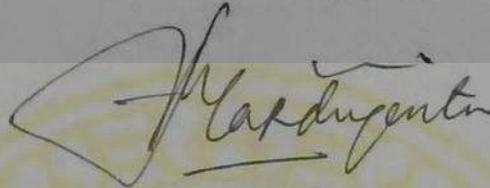
**MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2015**

Lembar Persetujuan :

TESIS TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
TANGGAL : 30 JUNI 2015

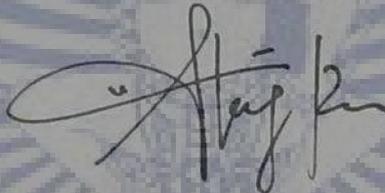
Oleh:

Pembimbing Ketua



ANTUN MARDIYANTA, Dr., MA.
NIP. 19611031 198810 1 001

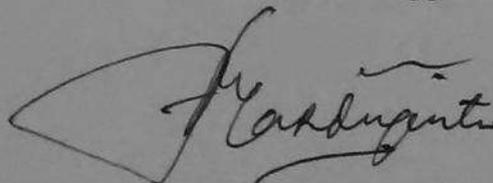
Konsultan



ERNA SETIJANINGRUM, S.I.P., M.Si.
NIP. 19700503 200003 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

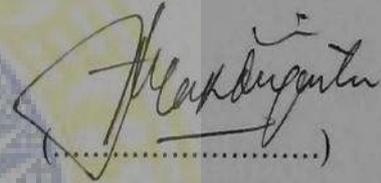


ANTUN MARDIYANTA, Dr., MA.
NIP. 19611031 198810 1 001

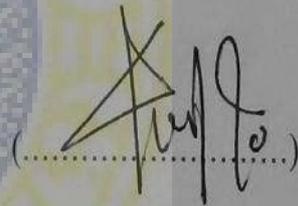
TESIS TELAH DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PENGUJI
PADA TANGGAL 09 JULI 2015

PANITIA PENGUJI TESIS

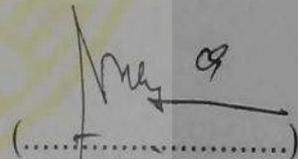
Ketua : Antun Mardiyanta, Dr., MA.

()

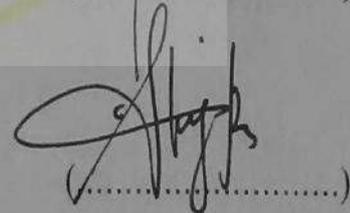
Anggota : 1. Drs. Bintoro Wardianto, MS.

()

2. Drs. Roestoto Hartojo Putro, S.U.

()

3. Erna Setijaningrum, S.I.P., M.Si.

()

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penulis kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Tesis.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, Juni 2015



SITI MARDIANI

NIM. 071143021



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan rahmat-Nya sehingga Tesis dengan judul “ *Implementasi Kebijakan Pelayanan AK/I di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang*” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pemikiran *mainstream* selama ini berkata bahwa AK/I hanya berfungsi sebagai pelengkap berkas lamaran pekerjaan. Namun tidak banyak yang cukup kritis mempertanyakan apa tujuan kebijakan tersebut, karena jika hanya sekedar untuk mengetahui identitas, riwayat pendidikan maupun pekerjaan, tidak memerlukan AK/I. Pada proses penggalan data di lapangan, penulis memahami bahwa kebijakan pelayanan penempatan tenaga kerja tidak hanya mengenai AK/I, tetapi masih ada AK/II hingga AK/V. Selain itu, kelimanya tidak dapat dipisahkan jika ingin berhasil mencapai tujuan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Pandangan skeptis masyarakat atas beberapa kebijakan publik memberi kesan rumit dan berbelit-belit, tidak terkecuali kebijakan pelayanannya. Namun jika mau menelaah lebih jauh hingga ke akar masalah kebijakan tersebut dibuat, terungkaplah sebuah cita-cita luhur Negara untuk menyejahterakan kehidupan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang terkadang dianggap tidak populis. Demikian yang penulis temukan dalam dalam proses penelitian mengenai implementasi kebijakan pelayanan AK/I – AK/V. Semangat yang begitu indah dibangun di pusat saat menyusun kebijakan tersebut ternyata tidak menetes hingga ke bawah. Kebijakan ada dan diimplementasikan. Namun hanya serupa mata air yang kering, tanpa ada dampak dan manfaat bagi masyarakat.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang dimiliki, oleh karenanya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Maka, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si. selaku Dekan Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
2. Antun Mardiyanta, Dr., MA. selaku Ketua Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sekaligus Dosen Pembimbing Ketua.
3. Erna Setijaningrum, S.I.P., M.Si. selaku Konsultan Pembimbing.
4. Dr. Bintoro Wardiyanto, Drs. MSi selaku Penguji I.
5. Roestoto Hartojo Putro, Drs., SU selaku Penguji II.
6. Seluruh dosen dan karyawan pada Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang telah membantu.

7. Ir. Heru Widjajanto, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Kabupaten Jombang.
8. Seluruh pejabat dan staf yang membidangi penempatan tenaga kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Kabupaten Jombang yang telah membantu dalam proses penelitian.
9. Para pencari kerja yang menjadi narasumber.
10. Untuk kedua orangtuaku (Bapak dan Ibuku) dan Adikku yang selalu mendoakan saya.
11. Buat suamiku dan anakku tercinta yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, tidak ada karya yang sempurna. Maka, kritik dan saran selalu diperlukan sebagai langkah perbaikan. Besar harapan saya, karya ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

Penulis,

SITI MARDIANI, ST

RINGKASAN

Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, dan menyediakan berbagai pelayanan ketenagakerjaan dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Berbagai kebijakan di bidang ketenagakerjaan telah dibuat sejak masa pemerintahan presiden pertama Indonesia hingga saat ini. Ini menunjukkan komitmen pemerintah yang tinggi terkait masalah ketenagakerjaan tersebut. Namun, angka pengangguran terbuka di Indonesia nyatanya masih tinggi, yaitu berkisar antara 6-7% atau sekitar 7,4 juta penduduk (*Sakernas BPS 2013*).

Di Provinsi Jawa Timur terjadi hal serupa, begitu pula di Kabupaten Jombang. Kebijakan ketenagakerjaan telah dijalankan, pelayanan penempatan tenaga kerja juga telah dilakukan, tetapi hasilnya belum juga maksimal. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih sangat rendah, yang menunjukkan bahwa para pengangguran tersebut adalah pengangguran pasif yang tidak aktif di pasar kerja. Padahal pada era seperti sekarang ini, pasar kerja bergerak sangat dinamis dan harus selalu diikuti jika tidak ingin tertinggal informasi.

Rendahnya TPAK di Kabupaten Jombang dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja yang membuat AK/I, yaitu hanya sekitar 20% dari angka pengangguran di Kabupaten Jombang. Sisanya adalah pengangguran pasif sebanyak 80%. Padahal Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang telah melaksanakan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.07/MEN/IV/2008 mengenai penempatan tenaga kerja, yaitu melalui pelayanan AK/I – AK/V. Tetapi, berdasarkan observasi awal, ternyata kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara komprehensif, hanya dilaksanakan secara parsial melalui pelayanan AK/I. Tidak ada tindak lanjut hingga penempatan. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa kebijakan AK/I – AK/V tidak mencapai tujuan utamanya, yakni penempatan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan penelusuran literatur. Wawancara mendalam dilakukan kepada penyedia jasa layanan dan pengguna jasa layanan. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, dimana terdapat empat dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu *Communications*, *Resources*, *Dispositions*, dan *Bureaucratic Structure*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pada poin *Communications*, ditemukan hambatan pada tahap transmisi, kejelasan dan konsistensi kebijakan. Hambatan tersebut secara singkat dapat digambarkan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat daerah tidak memahami kebijakan substantif pelayanan AK/I – AK/V sehingga kebijakan hanya dilaksanakan secara parsial. Prosedur utama dan yang penting justru dihilangkan. Selain itu, pejabat di tingkat daerah juga tidak konsisten dalam pelaksanaan kebijakan yang sesungguhnya sudah diketahui

kebijakan substantifnya. Pada poin *Resources*, hambatan paling besar adalah terkait fasilitas dan wewenang. Para pejabat pelaksana di tingkat daerah menggunakan wewenangnya untuk melaksanakan kebijakan pelayanan ketenagakerjaan secara parsial, yakni hanya pelayanan AK/I saja. Fasilitas juga masih banyak kekurangan sehingga proses implementasi mengalami hambatan. Pada poin *Dispositions*, sikap dan persepsi pejabat pelaksana di daerah mengakibatkan kebijakan dilaksanakan secara parsial dan hilangnya prosedur wawancara. Pada akhirnya hal tersebut menyebabkan apresiasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut rendah. Pada poin *Bureaucratic Structure*, SOP yang dibuat justru malah menghambat keberhasilan implementasi. Sedangkan fragmentasi membuat koordinasi antar bidang terhambat.

